

**PERAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN
KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA (PADA
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN BULUNGAN)**



PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan untuk
mencapai Gelar Sarjana (S-1) Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Kaltara

Disusun Oleh :

Eva Yetrina
NPM:202251022

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS KALTARA
2026**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep.....	10
2.1.1 Konsep Peran Kepala Dinas	10
2.1.2 Konsep Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	11
2.1.3 Konsep Hubungan Peran Kepala Dinas dengan Kinerja ASN	13
2.2 Penelitian Terdahulu	13
2.3 Kajian Teoritis	18
2.3.1 Peran Kepala Dinas	18
2.3.2 Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	21
2.3.3 Hubungan Peran Kepala Dinas dengan Kinerja Pegawai ASN	23
2.4 Kerangka Pemikiran.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian	26
3.1.1 Lokasi Penelitian.....	26
3.1.2 Waktu Penelitian	26
3.2 Jenis Penelitian	26
3.3 Data Dan Sumber Data.....	27
3.3.1 Jenis Data.....	27
3.3.2 Sumber Data	28
3.4 Fokus Penelitian.....	29
3.4.1 Peran Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai ASN	29
3.4.2 Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara	31
3.4.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Peran Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja ASN	31
3.5 Teknik Pengumpulan Data	32
3.5.1 Wawancara	32

3.5.2 Observasi	32
3.5.3 Dokumentasi	33
3.6 Uji Validitas Data	33
3.6.1 Triangulasi Sumber	33
3.6.2 Triangulasi Teknik	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
DAFTAR PUSTAKA	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan berkualitas sangat bergantung pada kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik dan penyedia layanan kepada masyarakat. ASN dituntut untuk bekerja secara profesional, disiplin, bertanggung jawab, serta berorientasi pada pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kinerja ASN menjadi faktor penting dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi pemerintah, khususnya di lingkungan pemerintahan daerah.

Kinerja ASN tidak hanya dinilai dari pencapaian target kerja internal organisasi, tetapi juga dari kualitas pelayanan publik yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kualitas pelayanan publik tersebut adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). IKM mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah dan menjadi tolak ukur penting dalam menilai kinerja ASN dalam melaksanakan tugas pelayanan publik. Dengan demikian, peningkatan kinerja ASN diharapkan berdampak langsung pada meningkatnya kepuasan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan daerah, peningkatan kinerja ASN tidak dapat dilepaskan dari peran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kepala Dinas sebagai pimpinan OPD menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, yang memiliki tanggung jawab manajerial dalam mengelola organisasi dan sumber

daya aparatur. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“ Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi “.

Ketentuan tersebut secara jelas menegaskan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi, termasuk Kepala Dinas, memiliki peran strategis dalam mengelola ASN dan organisasi. Kepala Dinas tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga sebagai pemimpin manajerial yang bertanggung jawab dalam mengelola, memotivasi, serta mendukung pengembangan Pegawai ASN. Selain itu, Kepala Dinas memiliki kewenangan dalam mendayagunakan sumber daya organisasi dan mengambil keputusan sesuai dengan tingkat jabatannya guna mencapai tujuan organisasi.

Sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan menjalankan fungsi kepemimpinan yang mencakup peran sebagai pembina, pengarah, pengawas, dan motivator bagi ASN. Peran tersebut diwujudkan melalui pembinaan pegawai, pengembangan kompetensi ASN, pengaturan pembagian tugas, pengawasan kinerja, serta pemberian motivasi kerja kepada pegawai. Efektivitas pelaksanaan peran tersebut

akan sangat menentukan kinerja ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Pada tataran yang lebih khusus, Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi strategis dalam pengembangan sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata daerah. Dinas ini memiliki struktur organisasi yang terdiri dari enam bidang, yaitu :

1. Tata Usaha dan Sekretariat
2. Bidang Kebudayaan
3. Bidang Keuangan
4. Bidang Olahraga
5. Bidang Pariwisata
6. Bidang Pemuda

Keberadaan enam bidang tersebut menuntut adanya pengelolaan ASN yang efektif serta koordinasi yang baik agar setiap bidang dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.

Dalam pelaksanaannya, ASN di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dituntut untuk bekerja secara profesional dengan memperhatikan kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, disiplin kerja, dan tanggung jawab. Peran Kepala Dinas sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi menjadi sangat penting sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2023, karena Kepala Dinas bertanggung jawab dalam mengelola dan

memotivasi ASN lintas bidang, mendukung pengembangan pegawai, serta mendayagunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dinas.

Kinerja ASN di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dapat dilihat secara nyata melalui capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pada tahun 2024, nilai IKM tercatat sebesar 78,60 yang berada dalam kategori baik. Selanjutnya, pada tahun 2025, nilai IKM mengalami peningkatan menjadi 81,12, yang juga termasuk dalam kategori baik dan menunjukkan adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan nilai IKM tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kinerja ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Data tersebut diperoleh melalui observasi awal yang dilakukan peneliti dengan berkunjung langsung ke kantor Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan guna memperoleh informasi lebih dalam. Selain itu, sebelum pelaksanaan observasi lapangan, peneliti juga telah mengakses data yang dipublikasikan secara resmi melalui website resmi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan serta media sosial resmi Instagram @dkop_kabbulungan. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari informasi resmi instansi serta hasil pengamatan langsung peneliti di lapangan

Peningkatan IKM dari tahun 2024 ke tahun 2025 tidak terlepas dari peran Kepala Dinas sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2023. Melalui pengelolaan ASN yang lebih

terarah, pembinaan yang berkelanjutan, serta pengambilan keputusan yang tepat sesuai tingkat jabatan, Kepala Dinas berperan dalam mendorong peningkatan kinerja ASN yang berdampak pada meningkatnya kepuasan masyarakat.

Namun demikian, meskipun terjadi peningkatan nilai IKM, belum diketahui secara mendalam bagaimana peran Kepala Dinas dijalankan dalam meningkatkan kinerja ASN pada masing-masing bidang serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas peran tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji secara mendalam peran Kepala Dinas sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, serta kaitannya dengan kinerja ASN yang tercermin melalui kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, disiplin, tanggung jawab, dan tingkat kepuasan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian dengan judul “Peran Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Studi Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan)” menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji peran Kepala Dinas sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 15 ayat (1), serta faktor-faktor yang memengaruhi peran tersebut dalam meningkatkan kinerja ASN dan kualitas pelayanan publik.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan?

2. Apa saja faktor yang memengaruhi peran Kepala Dinas dalam upaya meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Peran Kepala Dinas dalam upaya meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam bidang Sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan perilaku organisasi, kepemimpinan birokrasi, serta dinamika kinerja Aparatur Sipil Negara dalam lingkungan pemerintahan daerah. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas topik serupa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan serta pemerintah daerah secara umum. Rekomendasi tersebut berkaitan dengan strategi peningkatan kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara melalui penguatan peran Kepala Dinas, perbaikan sistem pembinaan, serta pengembangan lingkungan kerja yang lebih produktif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Identifikasi/Pembatasan Konsep

Identifikasi dan pembatasan konsep dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan terhadap konsep-konsep utama yang digunakan, sehingga tidak menimbulkan perbedaan penafsiran serta menjaga agar penelitian tetap fokus dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Pembatasan konsep juga diperlukan untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas di luar konteks penelitian.

Berdasarkan judul penelitian “Peran Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan”, maka konsep utama yang diidentifikasi dan dibatasi dalam penelitian ini meliputi:

2.1.1 Konsep Peran Kepala Dinas

Peran Kepala Dinas dalam penelitian ini dibatasi pada peran Kepala Dinas sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan. Peran yang dimaksud adalah peran manajerial dan kepemimpinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 15 ayat (1), yaitu peran dalam mengelola, memotivasi, mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya, serta mengambil keputusan menurut tingkat jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam penelitian ini, peran Kepala Dinas tidak dibahas secara umum atau politis, melainkan dibatasi pada peran yang dijalankan Kepala Dinas dalam konteks

internal organisasi dan hubungannya dengan peningkatan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Adapun indikator peran Kepala Dinas yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kerangka pemikiran, yaitu:

1. Mengelola ASN, yang mencakup pengaturan pembagian tugas, koordinasi kerja, dan pengendalian pelaksanaan tugas pegawai.
2. Memotivasi ASN, yang mencakup pemberian dorongan kerja, keteladanan pimpinan, serta penciptaan suasana kerja yang kondusif.
3. Mendukung pengembangan ASN, yang meliputi pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan kompetensi pegawai.
4. Mendayagunakan sumber daya, yang meliputi pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.
5. Pengambilan keputusan menurut tingkat jabatannya, yaitu kewenangan Kepala Dinas dalam menetapkan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas organisasi.

Peran Kepala Dinas dalam penelitian ini diidentifikasi melalui persepsi informan dan temuan lapangan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2.1.2 Konsep Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

Konsep kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penelitian ini dibatasi pada hasil kerja ASN di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan yang diemban. Kinerja ASN tidak diukur secara kuantitatif melalui

angka statistik kinerja individu, melainkan dipahami secara kualitatif berdasarkan perilaku kerja dan pelaksanaan tugas sehari-hari.

Indikator kinerja ASN dalam penelitian ini dibatasi pada indikator yang relevan dengan fokus penelitian dan mengacu pada kajian teoritis serta peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Kualitas kerja pegawai, yaitu tingkat ketepatan dan profesionalitas ASN dalam menyelesaikan pekerjaan.
2. Kuantitas kerja pegawai, yaitu kemampuan ASN dalam menyelesaikan beban kerja sesuai dengan target.
3. Ketepatan waktu, yaitu kemampuan ASN menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
4. Disiplin kerja, yaitu kepatuhan ASN terhadap aturan, jam kerja, dan tanggung jawab tugas.
5. Tanggung jawab kerja, yaitu kesungguhan ASN dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Kinerja ASN dalam penelitian ini juga dikaitkan secara tidak langsung dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai gambaran umum kualitas pelayanan publik yang dihasilkan oleh kinerja ASN.

2.1.3 Konsep Hubungan Peran Kepala Dinas dengan Kinerja ASN

Konsep hubungan antara peran Kepala Dinas dan kinerja Pegawai ASN dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh peran Kepala Dinas dalam menjalankan fungsi manajerial dan kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja ASN. Hubungan tersebut dilihat dari bagaimana peran Kepala Dinas dalam mengelola, memotivasi, mendukung pengembangan ASN, mendayagunakan sumber daya, serta mengambil keputusan berdampak pada kualitas dan perilaku kerja ASN.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik yang diteliti. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan penelitian, memperkuat landasan teoritis, serta menunjukkan posisi dan kebaruan penelitian yang dilakukan peneliti.

Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dijadikan referensi peneliti, yaitu :

No	Nama dan Judul Penelitian	Judul Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
1.	Devota Wambon, Novita Medyati, Sarce Makaba, Samuel Piter Irah, Yacob Ruru, Rosmin M. Tingginehe	“Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Dinas Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke “	2024	Kepala dinas telah menjalankan peran kepemimpinan melalui keteladanan, empati, dan pengawasan informal. Namun, masih terdapat kelemahan dalam koordinasi, monitoring dan evaluasi, serta penyelesaian masalah internal dan eksternal.

2.	Mulyono, Wesmikel, dan Haeruddin	“ Upaya Kepala Dinas untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ”	2024	Kepala dinas meningkatkan kinerja pegawai melalui penerapan SOP, keteladanan pimpinan, pelatihan, dan rapat rutin. Hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan SDM, kompetensi pegawai, dan penguasaan teknologi
3.	Firman Talib, Daud M. Liando, dan Maria H. Pratiknjo.	“ Peran Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara “	2019	Kepala dinas telah menjalankan peran sebagai katalisator, fasilitator, penghubung sumber, dan komunikator dengan baik, namun peran sebagai pemecah masalah belum berjalan secara optimal.
4.	Saiful Azmi, Harun, dan Khairuddin	“ Peran Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara “	2021	Peran kepala dinas berpengaruh terhadap peningkatan kinerja ASN melalui pembinaan, pengawasan, motivasi kerja, dan komunikasi organisasi, meskipun masih terdapat kendala disiplin dan keterbatasan sarana kerja
5.	Aura Fadhilah, Syamsir Saili, Fatia Nur Fadila Qomari, Melani Putri, Zahra Fadhilah, dan Zahra Sefnita	“ Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Sosial Kota Padang “	2025	Kepemimpinan yang demokratis, partisipatif, dan humanis berdampak positif terhadap motivasi, loyalitas, dan kinerja pegawai serta meningkatkan efektivitas kerja dan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan penelitian diatas, beberapa penelitian telah mengkaji peran Kepala Dinas maupun kepemimpinan pimpinan instansi pemerintah dalam meningkatkan kinerja pegawai pada berbagai organisasi perangkat daerah. Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh penting terhadap disiplin, motivasi, dan produktivitas kerja pegawai. Namun, setiap instansi memiliki karakteristik, tugas, dan dinamika organisasi yang berbeda, sehingga temuan penelitian terdahulu belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbandingan melalui analisis persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan guna menegaskan posisi, fokus, serta kebaruan penelitian ini.

Berdasarkan uraian tersebut, berikut peneliti paparkan persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang peneliti dilakukan.

A. Penelitian Terdahulu Pertama Yang Berjudul “ Analisis Peran Kepemimpinan Kepala Dinas Terhadap Kinerja Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke”

Persamaan :

- a. Sama-sama meneliti kepemimpinan Kepala Dinas sebagai faktor yang memengaruhi kinerja pegawai.
- b. Sama-sama membahas hubungan antara peran pimpinan dan peningkatan kinerja organisasi.

- c. Sama-sama dilakukan di lingkungan pemerintah daerah.

Perbedaan :

- a. Tempat dan waktu penelitian yang berbeda
 - b. Objek instansi yang berbeda
 - c. Penelitian terdahulu menekankan analisis pengaruh kepemimpinan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan bentuk peran, strategi, serta praktik manajerial Kepala Dinas.
- B. penelitian Terdahulu Kedua “ Upaya Kepala Dinas untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur ”

Persamaan:

- a. Sama-sama membahas upaya/peran Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja pegawai.
- b. Sama-sama melihat tindakan pembinaan, pengarahan, dan motivasi pimpinan.
- c. Sama-sama dilakukan pada tingkat kabupaten.

Perbedaan:

- a. Instansi berbeda
- b. Tempat dan Waktu Penelitian yang berbeda

C. Penelitian Terdahulu Ketiga yang berjudul “ Peran Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara “

Persamaan :

- a. Sama-sama meneliti peran Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja PNS/ASN.
- b. Sama-sama mengkaji kepemimpinan dalam organisasi perangkat daerah.
- c. Sama-sama berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Perbedaan :

- a. Tempat dan waktu penelitian yang berbeda
- b. Objek instansi Penelitian yang berbeda

D. Penelitian Terdahulu Keempat yang berjudul “ Peran Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara “

Persamaan:

- a. Sama-sama meneliti peran Kepala Dinas secara langsung terhadap kinerja ASN.
- b. Sama-sama menjadikan kinerja ASN sebagai fokus utama penelitian.
- c. Sama-sama menelaah fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi pegawai.

Perbedaan:

- a. Penelitian terdahulu bersifat umum/tidak spesifik pada sektor tertentu, sedangkan penelitian ini spesifik pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Bulungan .

E. Penelitian Terdahulu Kelima yang berjudul “ Peran Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Sosial Kota Padang “

Persamaan :

- a. Sama-sama membahas kepemimpinan sebagai faktor penting peningkatan kinerja pegawai.
- b. Sama-sama dilakukan pada instansi pemerintah daerah.

Perbedaan :

- a. Waktu dan Lokasi penelitian yang berbeda

2.3 Kajian Teoritis

2.3.1 Peran Kepala Dinas

Peran Kepala Dinas merupakan keseluruhan fungsi, tanggung jawab, dan tindakan yang dijalankan oleh Kepala Dinas sebagai pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola organisasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mencapai tujuan organisasi. Kepala Dinas sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi memiliki peran manajerial dan kepemimpinan yang strategis dalam mengarahkan, mengoordinasikan, serta mengendalikan kinerja ASN.

Menurut Siagian (2003), peran pimpinan dalam organisasi pemerintahan tidak hanya terbatas pada fungsi administratif, tetapi juga mencakup fungsi manajerial dan kepemimpinan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, motivasi, dan pengawasan terhadap pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana pimpinan menjalankan perannya dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya

manusia. Secara normatif, peran Kepala Dinas sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, khususnya Pasal 15 ayat (1) yang menyatakan bahwa “ Jabatan pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan Jabatan Manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, dan mendukung pengembangan Pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya serta mengambil keputusan menurut tingkatan jabatannya, untuk mencapai tujuan organisasi “ . Ketentuan ini sejalan dengan pandangan Mintzberg yang menyatakan bahwa pimpinan memiliki peran interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan dalam organisasi.

Berdasarkan ketentuan normatif dan teori para ahli tersebut, peran Kepala Dinas dalam penelitian ini dipahami melalui indikator-indikator berikut:

1. Mengelola ASN

Peran mengelola ASN berkaitan dengan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian pekerjaan pegawai. Terry (2006) menjelaskan bahwa manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Kepala Dinas bertanggung jawab mengatur pembagian tugas, menetapkan target kerja, serta memastikan ASN bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan ASN yang baik akan menciptakan keteraturan kerja dan meningkatkan efektivitas organisasi.

2. Memotivasi ASN

Peran memotivasi ASN merupakan bagian penting dari kepemimpinan. Menurut Robbins (2006), motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan individu dalam mencapai tujuan. Kepala Dinas sebagai pimpinan berperan dalam memberikan dorongan kerja melalui keteladanan, komunikasi yang efektif, penghargaan, serta penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Motivasi yang baik akan meningkatkan semangat kerja ASN dan berdampak pada peningkatan kinerja pegawai.

3. Mendukung Pengembangan ASN

Peran Kepala Dinas dalam mendukung pengembangan ASN berkaitan dengan upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas pegawai. Hasibuan (2017) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, konseptual, dan moral pegawai agar kinerjanya semakin baik. Dalam hal ini, Kepala Dinas berperan memberikan kesempatan pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier, serta pengembangan kompetensi ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi.

4. Mendayagunakan Sumber Daya

Pendayagunaan sumber daya merupakan bagian dari fungsi manajerial pimpinan. Menurut Handoko (2014), efektivitas organisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan pimpinan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal. Kepala Dinas bertanggung jawab mendayagunakan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, serta waktu kerja secara efisien agar program dan

kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan kinerja ASN.

5. Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan merupakan peran penting pimpinan dalam organisasi. Simon (1997) menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah inti dari proses manajemen, karena keputusan yang diambil akan menentukan arah dan tindakan organisasi. Sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepala Dinas memiliki kewenangan mengambil keputusan sesuai dengan tingkat jabatannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keputusan yang tepat dan akuntabel akan menjadi pedoman bagi ASN dalam melaksanakan tugas dan mencapai tujuan organisasi.

Dengan demikian, peran Kepala Dinas dalam penelitian ini dipahami sebagai peran manajerial dan kepemimpinan yang mencakup kemampuan mengelola ASN, memotivasi pegawai, mendukung pengembangan ASN, mendayagunakan sumber daya, serta mengambil keputusan sesuai dengan tingkat jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dan diatur dalam peraturan perundang-undangan, menjadi faktor penting dalam meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kualitas pelayanan publik.

2.3.2 Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan hasil kerja yang dicapai oleh ASN dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jabatan dan fungsi yang diemban. Kinerja ASN mencerminkan tingkat keberhasilan

pegawai dalam mencapai target kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, kinerja ASN dinilai melalui sistem manajemen kinerja yang mencakup perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, pemantauan, penilaian, dan tindak lanjut hasil penilaian. Kinerja ASN tidak hanya diukur dari aspek kuantitas dan kualitas pekerjaan, tetapi juga dari kedisiplinan, tanggung jawab, dan orientasi pada pelayanan publik. Kinerja pegawai ASN dapat dilihat dari beberapa indikator utama, antara lain:

1. Kualitas kerja, yaitu tingkat ketepatan, ketelitian, dan profesionalitas dalam menyelesaikan pekerjaan.
2. Kuantitas kerja, yaitu jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan sesuai target.
3. Ketepatan waktu, yaitu kemampuan menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
4. Disiplin kerja, yaitu kepatuhan terhadap peraturan, jam kerja, dan tanggung jawab tugas.
5. Tanggung jawab kerja, yaitu kesungguhan ASN dalam melaksanakan tugas dan menyelesaikan pekerjaan dengan baik.

Kinerja ASN yang baik akan berdampak pada meningkatnya efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

2.3.3 Hubungan Peran Kepala Dinas dengan Kinerja Pegawai ASN

Peran Kepala Dinas memiliki hubungan yang erat dengan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Kepemimpinan yang efektif dari Kepala Dinas akan menciptakan kejelasan tugas, meningkatkan motivasi kerja, memperkuat disiplin, serta membangun lingkungan kerja yang kondusif. Sebaliknya, peran pimpinan yang kurang optimal dapat menyebabkan rendahnya semangat kerja, ketidakjelasan tugas, dan menurunnya kinerja ASN. Penelitian oleh Saiful Azmi dkk. menunjukkan bahwa strategi kepemimpinan Kepala Dinas, seperti pemberian keteladanan, penerapan standar operasional prosedur, serta pendekatan partisipatif, berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik peran Kepala Dinas dalam menjalankan fungsi kepemimpinannya, maka semakin meningkat pula kinerja ASN.

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir penelitian ini disusun berdasarkan landasan normatif yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aparatur Sipil Negara, yang menyatakan bahwa jabatan pimpinan tinggi merupakan jabatan manajerial tingkat tinggi yang bertanggung jawab dan berperan dalam mengelola, memotivasi, mendukung pengembangan pegawai ASN, mendayagunakan sumber daya, serta mengambil keputusan sesuai tingkatan jabatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pimpinan instansi, termasuk Kepala Dinas, memiliki tanggung jawab strategis dalam menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

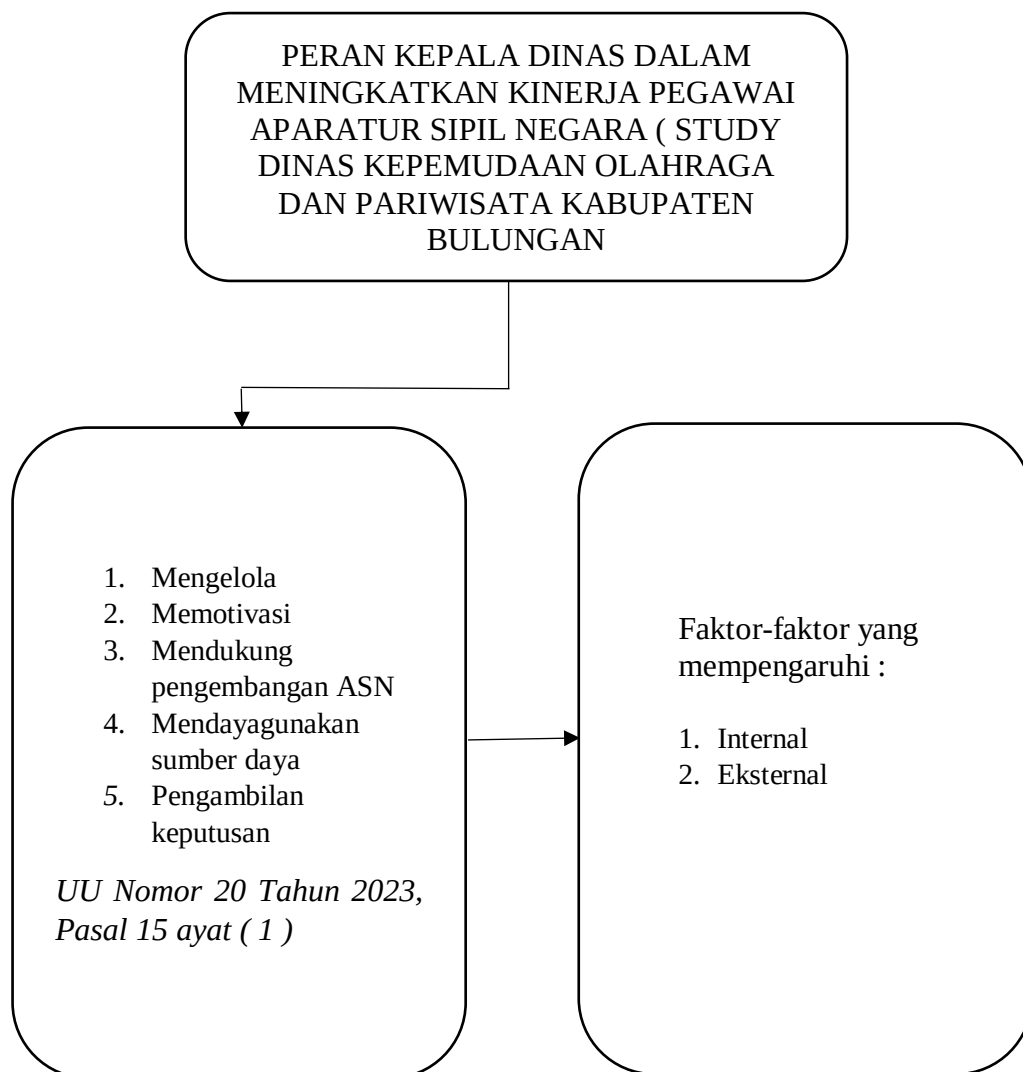
Berdasarkan landasan tersebut, peran Kepala Dinas kemudian dijabarkan ke dalam indikator-indikator pada kerangka berpikir penelitian, yaitu kemampuan dalam mengelola pegawai, memberikan motivasi kerja, melakukan pembinaan dan pengembangan kompetensi ASN, mendayagunakan sumber daya organisasi secara efektif, serta mengambil keputusan yang tepat dalam pelaksanaan tugas. Indikator-indikator ini menjadi fokus analisis untuk melihat bagaimana kepemimpinan dijalankan dalam praktik di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan. Pelaksanaan peran kepemimpinan tersebut tidak berjalan secara otomatis, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam organisasi. Faktor ini meliputi kompetensi dan kemampuan manajerial Kepala Dinas, kualitas sumber daya manusia pegawai, kedisiplinan kerja, motivasi pegawai, komunikasi internal, kerja sama tim, budaya organisasi, serta ketersediaan sarana dan prasarana kerja. Apabila faktor-faktor internal ini berjalan dengan baik, maka pelaksanaan peran kepemimpinan akan lebih efektif dan berdampak positif terhadap kinerja ASN.

Sementara itu, faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar organisasi yang turut memengaruhi pelaksanaan peran pimpinan. Faktor ini dapat berupa kebijakan pemerintah daerah, dukungan anggaran, regulasi yang berlaku, tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik, perkembangan lingkungan sosial, serta dinamika kebutuhan sektor kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.

Kondisi eksternal tersebut dapat menjadi peluang maupun hambatan dalam upaya peningkatan kinerja pegawai.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk menganalisis pelaksanaan peran Kepala Dinas beserta faktor-faktor yang memengaruhinya dalam rangka meningkatkan kinerja ASN di Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.



Gambar 2.4 kerangka pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian

3.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, sebuah Organisasi Perangkat Daerah yang berkedudukan di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran penting dinas tersebut dalam memberikan pelayanan publik dan menjalankan program strategis di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata.

3.1.2 Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal di keluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu 2 bulan yang meliputi pengumpulan data dan pengolahan dalam penyajian bentuk proposal skripsi.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam peran Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan fenomena kepemimpinan dan kinerja ASN berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh gambaran yang utuh dan kontekstual.

3.3 Data Dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sehingga data yang dikumpulkan berupa data non-angka yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang diteliti. Data dalam penelitian ini difokuskan pada pengungkapan peran Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) serta faktor-faktor yang memengaruhi peran tersebut berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu:

A. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lokasi penelitian. Data ini diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian.

Data primer dalam penelitian ini meliputi informasi mengenai:

- a) Peran Kepala Dinas dalam membina, mengarahkan, mengawasi, dan memotivasi ASN.
- b) Pelaksanaan kinerja ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

- c) Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja ASN.

Pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang bersifat deskriptif, mendalam, dan kontekstual.

B. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi dan memperkuat data primer. Data ini diperoleh melalui sumber tertulis dan dokumentasi yang relevan dengan penelitian. Data sekunder digunakan sebagai bahan pembandingan serta dasar teoritis dalam menganalisis temuan penelitian.

3.3.2 Sumber Data

A. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari informan yang dipilih secara purposive, yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan penelitian, meliputi:

- a. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagai informan kunci.
- b. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

B. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder berasal dari:

- a. Dokumen resmi instansi (struktur organisasi, tupoksi, laporan kinerja, dokumen penilaian kinerja).
- b. Peraturan perundang-undangan terkait ASN dan kinerja.
- c. Buku, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan.

3.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan utama yang menjadi pusat perhatian peneliti agar penelitian lebih terarah dan mendalam. Dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian berfungsi untuk menentukan aspek-aspek penting yang akan dikaji sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah penelitian. Berdasarkan judul penelitian yang peneliti ambil, yaitu berjudul *“Peran Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan”*, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut

3.4.1 Peran Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai ASN

Fokus penelitian pada bagian ini diarahkan untuk mengkaji peran Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagai Jabatan Pimpinan Tinggi dalam meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Peran Kepala Dinas yang dimaksud dalam penelitian ini disesuaikan dengan indikator peran Kepala Dinas sebagaimana tercantum dalam kerangka pemikiran dan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pasal 15 ayat (1).

Adapun fokus penelitian terkait peran Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja ASN meliputi:

1. Peran Kepala Dinas dalam mengelola ASN, yaitu bagaimana Kepala Dinas mengatur pembagian tugas, mengoordinasikan pekerjaan, serta melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas ASN agar berjalan sesuai dengan tujuan organisasi.
2. Peran Kepala Dinas dalam memotivasi ASN, yaitu bagaimana Kepala Dinas memberikan dorongan kerja, membangun semangat dan disiplin kerja ASN, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif guna meningkatkan kinerja pegawai.
3. Peran Kepala Dinas dalam mendukung pengembangan ASN, yaitu bagaimana Kepala Dinas memberikan pembinaan, kesempatan pengembangan kompetensi, serta dukungan terhadap pendidikan dan pelatihan ASN guna meningkatkan profesionalitas dan kemampuan kerja pegawai.
4. Peran Kepala Dinas dalam mendayagunakan sumber daya, yaitu bagaimana Kepala Dinas memanfaatkan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana secara efektif dan efisien untuk mendukung peningkatan kinerja ASN.
5. Peran Kepala Dinas dalam pengambilan keputusan, yaitu bagaimana Kepala Dinas menetapkan kebijakan dan mengambil keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas ASN serta pencapaian tujuan organisasi.

3.4.2 Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara

Fokus kedua penelitian ini adalah menggambarkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan, yang ditinjau melalui:

1. Kualitas kerja pegawai.
2. Kuantitas kerja pegawai.
3. Ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas.
4. Disiplin kerja pegawai.
5. Tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan tugas.

3.4.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Peran Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja ASN

Fokus ketiga penelitian ini adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi peran Kepala Dinas dalam upaya meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang meliputi:

1. Faktor Internal
2. Faktor Eksternal

Dengan adanya fokus penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas, mendalam, dan sistematis mengenai peran Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara serta faktor-faktor yang memengaruhinya di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara terpadu dan saling melengkapi, sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada informan untuk memperoleh informasi yang rinci mengenai:

- a) Bagaimana peran Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja ASN.
- b) Bentuk pembinaan, pengawasan, dan motivasi yang diberikan kepada ASN.
- c) Faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas peran Kepala Dinas.

Wawancara ini menjadi sumber utama dalam memperoleh data primer.

3.5.2 Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung aktivitas kerja pegawai, pola interaksi antara Kepala Dinas dan ASN, serta suasana kerja di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

Observasi ini bertujuan untuk:

- a) Memperkuat hasil wawancara.
- b) Mengetahui kesesuaian antara pernyataan informan dan kondisi nyata di lapangan.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, berupa:

- a) Dokumen resmi instansi.
- b) Arsip kegiatan dan laporan kinerja.
- c) Peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan ASN dan kinerja.

Dokumen tersebut digunakan sebagai bukti pendukung dan bahan triangulasi data.

3.6 Uji Validitas Data

Uji validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Penerapan triangulasi bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepercayaan dan keakuratan data, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.6.1 Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek kembali informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan sebagai informan kunci dibandingkan dengan data yang diperoleh dari Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan dinas tersebut. Melalui triangulasi sumber, peneliti dapat mengetahui kesesuaian dan konsistensi informasi

terkait peran Kepala Dinas serta kinerja ASN, sehingga mengurangi subjektivitas dari satu sumber data saja.

3.6.2 Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara diverifikasi dengan hasil observasi terhadap aktivitas kerja pegawai dan pola kepemimpinan Kepala Dinas, serta diperkuat dengan dokumen resmi instansi seperti laporan kinerja dan arsip kegiatan. Dengan triangulasi teknik, data yang diperoleh tidak hanya bersumber dari pernyataan informan, tetapi juga didukung oleh bukti empiris di lapangan.

Dengan menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, keabsahan data dalam penelitian ini diharapkan dapat terjamin. Teknik triangulasi tersebut memungkinkan peneliti memperoleh data yang lebih objektif, konsisten, dan akurat dalam mengkaji peran Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Analisis data dilakukan sejak awal pengumpulan data dan berlangsung secara terus-menerus hingga penelitian selesai. Tujuan analisis data adalah untuk

mengolah, menafsirkan, dan memahami data secara mendalam sehingga dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Tahapan analisis data dalam penelitian ini meliputi:

A. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilahan, penyederhanaan, dan pemusatan perhatian pada data-data yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi diseleksi dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan indikator penelitian, yaitu peran Kepala Dinas, kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, serta faktor-faktor yang memengaruhi peran Kepala Dinas. Proses reduksi data dilakukan untuk menghindari data yang tidak relevan dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis lanjutan.

B. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan setelah data direduksi, yaitu dengan menyusun data dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks yang sistematis dan mudah dipahami. Penyajian data bertujuan untuk memperlihatkan hubungan antara peran Kepala Dinas dan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara secara jelas, sehingga peneliti dapat melihat pola, kecenderungan, dan keterkaitan antar data yang diperoleh.

C. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Tahap penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang dihasilkan bersifat sementara dan terus diverifikasi melalui proses triangulasi sumber dan triangulasi teknik guna memastikan keabsahan data. Kesimpulan akhir

diperoleh setelah data yang dikumpulkan menunjukkan konsistensi dan kesesuaian dengan fokus penelitian.

Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan temuan yang sistematis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai peran Kepala Dinas dalam meningkatkan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Bulungan.

JADWAL TUGAS AKHIR

Jadwal Skripsi	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei
Seminar Judul						
Seminar Proposal						
Pelaksanaan Penelitian						
Seminar Hasil						

DAFTAR PUSTAKA

- Azmi, S., Harun, C. Z., & Khairuddin. 2021. *Strategi Kepemimpinan Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 10(3): 519–528.
- Badrika, I. N., & Widianata, I. N. (2023). *Peranan Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar*. Widyanata, 20(01), 19–26
- Fadhilah, A., Saili, S., Qomari, F. N. F., Putri, M., Fadhilah, Z., & Sefnita, Z. 2025. *Peran Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Sosial Kota Padang*. Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(1): 4185–4191.
- Nonarming, N., Rahman, R., & Hasran, H. (2023). *Kepemimpinan Kepala Cabang Dinas dalam Peningkatan Kinerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Pangkep*. Journal of Government Insight, 3(2), 158–163.
- Republik Indonesia. 2023. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Teori & Praktik Kepemimpinan*. Edisi 5. Jakarta: Rineka Cipta. ISBN 979-518-169-6.
- Talib, F., Liando, D. M., & Pratiknjo, M. H. 2019. *Peran Kepala Dinas dalam Meningkatkan Kinerja PNS di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Administrasi Publik, 5(84).